

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif). Hasil karya penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadikan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara, metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN dan peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di bangsa Indonesia.

Metododologi yang digunakan ialah metodologi pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara adalah: Unsur Perilaku individualisme, Unsur lembaga pemerintahan, unsur Peraturan Perundang-undangan dan unsur pengendalian Pengawasan
2. Metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN adalah *hesistant-environmental*, *determined-environmental*, *hesistant-institutional*, *determined-institutional* di mana masing-masing strategi ini menggambarkan sifat komitmen pemerintah melalui institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yakni tindakannya lunak atau tegas (*hesistant* atau *determined*) dan preferensi pada salah satu jenis ukuran (strategi atau cara) anti korupsi yakni lingkungan atau kelembagaaan (*environmental* atau *institutional*).
3. Tugas dan Peran KPK adalah badan khusus untuk mengkoordinir dengan lembaga negara berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehingga peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia secara yuridis tidak dimiliki oleh KPK, namun melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK dapat mencegah tindak pidana korupsi dengan efek jera

Kata Kunci: Peran Komisi Pemberantasan Korupsi, Perilaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

ABSTRACT

This study, entitled The Role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Prevention of Behavior Corruption, Collusion and Nepotism by State Officials in Indonesia (Executive, Legislative and Judicial). The work of scientific writing is aimed to know the elements that make the behavior of the rampant corruption in Indonesia is carried out by the organizers state, the method used to shape human character KPK anti-corruption and the role of the Commission in the prevention of corruption behavior by State Officials in Indonesia.

Metododologi methodology used is yuridis- normative approach. The results of this study are that:

1) Factors contributing to the rampant corruption in Indonesia behavior committed by the organizers of the State are: Elements Behavioral individualism, government agencies element, the element Regulation Invitations Per laws and control elements Control

2) The method used KPK to shape human character anti-corruption is hesistant-environmental, determined-environmental, hesistant-institutional, determined-institutional in which each of these strategies describe the nature of the commitment of the government through the institution of the Corruption Eradication Commission that its actions soft or firm (hesistant or determined) and preference to one type of size (the strategy or how) the anti-corruption or institutional environment (environmental or institutional)

3) The tasks and role of the Commission is a specialized agency to coordinate with competent state agencies to take action to eradicate corruption, collusion and nepotism.

So that the Commission's role in the prevention of corruption behavior by State Officials in Indonesia legally not shared by the Commission, but through the implementation of the duties and authorities, the Commission can prevent corruption with the deterrent effect

Keywords: Role of the Corruption Eradication Commission, Behavior Collusion, Corruption and Nepotism